



Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dalam Penguatan Tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada Peserta Didik di Sekolah Menengah Atas

Sumaryati ✉¹, Lisa Retnasari ✉², Trining Winarti ✉³

Informasi Artikel	ABSTRAK
<p>Sejarah Artikel : Diterima Mei 2020 Revisi Juni 2020 Dipublikasikan Juli 2020</p> <p>Keywords : <i>Information Technology Integration, Civic Knowledge, Civic Skill, Civic Disposition, Topic Approach.</i></p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan manfaat teknologi informasi (TI) dalam penguatan tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMA. Teknologi informasi berperan penting sebagai upaya meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Teknologi informasi diharapkan mampu membantu terwujudnya <i>civic virtue</i> (keadaban kewarganegaraan), yang tergambar dalam penguasaan pengetahuan kewarganegaraan (<i>civic knowledge</i>), keterampilan kewarganegaraan (<i>civic skill</i>), dan karakter kewarganegaraan (<i>civic dispositions</i>). Metode penelitian yang gunakan yaitu kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan triangulasi model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi teknologi informasi dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di sekolah menengah atas mampu menguatkan tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Hasil temuan peserta didik mampu menjelaskan konsep-konsep Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang sedang dipelajari, baik saat tanya jawab, diskusi, maupun presentasi tugas. Integrasi teknologi informasi juga mampu menguatkan karakter kewarganegaraan (<i>civic disposition</i>) melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler.</p>
<p>How to Cite : Sumaryati, Lisa Retnasari & Trining Winarti (2020). Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dalam Penguatan Tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada Peserta Didik di Sekolah Menengah Atas. <i>Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan</i>, 5(2), pp. 1-12. DOI: 10.24269/jpk.v5.n2.2020.pp1-12</p>	<p>ABSTRACT <i>Utilization of Information Technology (IT) in Strengthening the Purposes of Pancasila and Citizenship Education in Students in High Schools. This study aims to describe the benefits of information technology (IT) in strengthening the goals of Pancasila Education and Citizenship in high school. Information technology plays an important role as an effort to improve the quality of the process and learning outcomes. Information technology is expected to be able to help the realization of civic virtue (civic citizenship), which is reflected in the mastery of civic knowledge, civic skills, and civic dispositions. The research method used is descriptive qualitative, data collection techniques through observation, interviews and documentation. Data analysis techniques using the triangulation of Miles and Huberman models. The results showed that the integration of information technology in the learning of Pancasila and Citizenship Education in senior high schools was able to strengthen the goals of Pancasila and Citizenship Education. The findings of students are able to explain the concepts of Pancasila and Citizenship Education that is being studied, both during question and answer, discussion, and assignment presentations. The integration of information technology is also able to strengthen the character of citizenship (civic disposition) through various extracurricular activities.</i></p>
<p>✉ Alamat korespondensi: Universitas Ahmad Dahlan ✉^{1,2}, SMA N 1 Bantul Yogyakarta ✉³</p>	
<p>✉ E-mail: sumaryati@ppkn.uad.ac.id ✉¹, lisa.retnasari@pgsd.uad.ac.id ✉², triningwinarti@gmail.com ✉³</p>	

Copyright © 2020 Universitas Muhammadiyah Ponorogo

PENDAHULUAN

Tanpa disadari kita telah hidup di masa era digital, dengan teknologi sebagai media di hampir semua aktivitas manusia. Kita ketahui era digital adalah era pada saat semua kebutuhan dan kepentingan manusia dihubungkan dengan

teknologi informasi, dan komunikasi. Transportasi, perdagangan, pendidikan, pelayanan umum telah menggunakan teknologi informasi, seperti adanya ojek *online*, belanja *online*, penggunaan jasa secara *online*, dan sebagainya. Masyarakat merasakan kemudahan

dengan adanya teknologi informasi yang canggih dan lengkap. Masyarakat pengguna telah berhitung dengan matang, efektivitas menjalankan tugas dan pekerjaannya dengan menggunakan bantuan teknologi informasi. Globalisasi berdampak mudahnya terobosan teknologi yang canggih dari negara maju ke negara berkembang termasuk Indonesia (*global vilage*) (Idrus, 2009). Teknologi merambah berbagai aspek kehidupan baik politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan. Demikian juga dengan dunia pendidikan tak luput dari perkembangan teknologi. Pendidikan saat ini juga perlu dukungan sumber daya manusia (SDM) yaitu pendidik yang kreatif cakap dalam menggunakan teknologi informasi (TI). Teknologi informasi dapat dijadikan sumber belajar yang efektif dan efisien. Hal ini memiliki hubungan dalam meningkatkan berfikir kritis peserta didik. Kehadiran teknologi informasi (TI) pada dunia pendidikan terwujudnya pembelajaran yang menyenangkan, efektif, dan menstimulus keterlibatan peserta didik secara aktif (Aka, Kukuh Andiria, 2017:29) Kemampuan keutuhan teknologi informasi (TI) dalam diakui dalam menyampaikan pesan mampu signifikan. Selain itu juga sesuai karakteristik generasi z yang dekat dengan teknologi, mereka akan lebih tertantang untuk menemukan hal-hal baru.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki tujuan agar peserta didik berkompeteren dalam pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan dan karakter kewarganegaraan. Pemahaman konsep-konsep kewarganegaraan merupakan hal ini penting bagi peserta didik, guna menyiapkan warga negara yang cakap dan berpartisipasi. Menurut Branson (1998:8-25) ada tiga kompetensi kewarganegaraan (*civic competences*), yakni pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*), dan watak kewarganegaraan (*civic disposition*). Kompetensi tersebut mampu menjadi bekal dalam membangun karakter warga negara yang baik dan cerdas. Pemahaman konsep kewarganegaraan sebagai dasar peserta didik terampil dalam berbuat dan berkelakuan baik sebagai warga negara, sehingga peserta didik memiliki kebiasaan berbuat baik.

Citizenship education sebagai istilah yang memiliki makna yang luas mengutip pendapat Cogan, 1999: 4) *both these in-school experiences as well as out of school or non-*

formal/informal learning which takes place in the family, the religious organization, community organizations, the media, etc which help shape the totality of th citizen. Pendidikan kewarganegaraan merupakan istilah general yang meliputi pengalaman belajar di sekolah maupun diluar sekolah, seperti dalam lingkungan keluarga, organisasi keagamaan, masyarakat, media serta berbagai hal yang mampu membantu membentuk warga negara secara totalitas. Pemahaman konsep kewarganegaraan secara holistik menjadi bekal dalam kebiasaan berbuat baik sebagai warga negara, selanjutnya menghantarkan peserta didik memiliki karakter warga negara yang baik dan cerdas.

Karakter warga negara yang dimaksud tersebut, dalam kenyataannya masih perlu diupayakan secara berkelanjutan. Hal tersebut merupakan salah satu gambaran atau kondisi yang menunjukkan bahwa mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan masih perlu banyak berbenah dalam rangka mencapai tujuannya secara maksimal. Hal penting dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan membutuhkan perhatian lebih serius adalah dalam penggunaan serta penerapan metode dan strategi pembelajarannya.

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki paradigma baru di abad 21 yakni perubahan seiring perkembangan zaman, tidak hanya ranah dan cakupan materi yang bergeser, namun konsep moral, karakter dan nilai menuju arah bagaimana menyiapkan warga negara baru yang berkarakter dan memiliki kemampuan, kecerdasan dan keterampilan. Selain itu juga perlu didukung dalam proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan harus menarik, menyenangkan, memotivasi, dan menumbuhkan budaya berfikir kritis secara rasional dalam menghadapi berbagai isu. Selama ini PPKn dikenal sebagai mata pelajaran yang monoton. Keterpaduan kurikulum dengan komunitas sekolah dan masyarakat harus selaras dan komperhensif (Dogonay, 2012: 37). Hal tersebut menjadi kunci sebagai misi mengembangkan pendidikan yang demokratis secara psiko pedagogis dan sosio andragogis memiliki arah dalam mengembangkan karakteristik warga negara yang demokratis.

Sebagai wujud pengaktualisasian tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tersebut perlu proses pengajaran yang menarik dan menyenangkan. Apalagi di era globalisasi

menjadi alasan perlunya sumber belajar seperti media pembelajaran yang menarik dan interaktif, sehingga mampu menciptakan komunikasi dua arah. Pembelajaran konvensional yang menjadikan guru sebagai pusat pembelajaran kurang relevan di zaman sekarang. Pemilihan metode mengajar dan strategi mengajar yang tepat, inovatif dan partisipatif sesuai karakteristik peserta didik menjadi kompetensi yang harus dimiliki guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Hal ini penting, karena mampu menstimulus peserta didik agar partisipatif dan budaya berfikir kritis tercipta dalam wadah pembelajaran yang menyenangkan. Metode pembelajaran diperlukan seorang pendidik secara bervariasi sebagai pendukung capaian pembelajaran. Model pembelajaran harus bersifat inovatif sebagai upaya strategi dalam mencapai capaian pembelajaran secara maksimal. Trianto (2010: 51), menjelaskan mode pembelajaran sebagai suatu perencanaan yang berfungsi sebagai acuan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Adapun jenis model pembelajaran yang inovatif dalam proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan seperti pembelajaran berbasis masalah, *discovery learning*, *Value Clarification Technique*, *inquiry*, dan lain sebagainya yang mampu meningkatkan berfikir kritis peserta didik.

Melihat hal tersebut teknologi merupakan salah satu alternatif yang mampu mewarnai pembelajaran dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Pengintegrasian teknologi informasi (TI) sebagai inovasi dalam proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan perlu dilakukan. Media pembelajaran yang sarat dengan teknologi memudahkan proses penyaluran informasi dan ilmu pengetahuan. Media perlu dirancang secara matang agar mampu membantu peserta didik untuk mengidentifikasi materi atau konsep Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan secara utuh.

Hasil penelitian Muhson Ali (2010:1) memiliki temuan bahwa di era globalisasi ditandai dengan perkembangan teknologi pembelajaran yang semakin canggih. Media pembelajaran berbasis teknologi informasi (TI) seperti internet *mobile phone*, *CD room* atau *flashdisk* adapun komponen utama seperti *Learning Management System (LMS)*, dan *Learning Content (LC)* mampu membantu para

peserta didik dalam memahami materi pembelajaran secara holistik.

Adapun hasil penelitian dari Haris Budiman (2017) menghasilkan temuan bahwa teknologi informasi (TI) membantu peserta didik dalam belajar selain itu juga memiliki kontribusi yang berpengaruh dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan memberikan fasilitas mengajar yang maksimal. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Sodik Anshori (2018) mendapati temuan pembelajaran berbasis teknologi menghasilkan konsep *e-learning* yang menjadikan proses efektifitas pembelajaran dan efisien. Berdampak pada partisipasi aktif peserta didik serta fleksibilitas program pembelajarannya lebih berkesan.

Berdasarkan hasil kajian di atas belum ada yang melakukan penelitian tentang penggunaan teknologi informasi (TI) sebagai media pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMA. Sekaligus karakter yang akan dikembangkan pada proses pembelajaran yang didukung dengan penggunaan media pembelajaran teknologi informasi (TI) berupa video atau film pendek dan literasi digital berupa *e-book* dan *e-jurnal*. Salah satu fungsi penguasaan dan penggunaan media adalah menghidupkan proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Oleh karena itu kolaborasi teknologi dirasa mampu mewujudkan tujuan PPKn. Kesadaran warga negara akan hak dan kewajibannya terbangun secara baik sebagai pembentuk identitas bangsa (Sutrisno, 2017). Artikel ini memfokuskan pada pertanyaan penelitian bagaimana pemanfaatan teknologi informasi (TI) dalam penguatan tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada peserta didik di sekolah menengah atas?

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan guna meneliti kondisi yang alamiah (Sugiyono, 2010). Subjek penelitian terdiri dari guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan peserta didik kelas X SMA N 1 Bantul Yogyakarta. Pengambilan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengumpulan data dengan melakukan diskusi konsep dan wujud materi pembelajaran. Serta penugasan seperti membuat film, artikel, dan poster. Diskusi materi pembelajaran dilakukan dengan cara guru menjelaskan materi pembelajaran, selanjutnya memberikan

pertanyaan yang dijawab oleh peserta didik, dan peserta didik tersebut selanjutnya menunjuk teman lainnya untuk menanggapi. Demikian untuk seterusnya. Pengumpulan data dengan tugas dilakukan dalam bentuk peserta didik membuat film pendek bertemakan bela negara dalam bentuk sikap anti korupsi, dengan durasi 15 menit, membuat artikel dan poster bertemakan bela negara. Dalam hal ini penggunaan media berbasis teknologi (TI), merupakan salah satu sumber belajar. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari pengumpulan, reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Integrasi Teknologi Informasi dalam Pembelajaran PPKn di kelas X SMA

Pelaksanaan Penugasan Dosen ke Sekolah di SMA N 1 Bantul dilaksanakan dalam bentuk penugasan dosen mengajar di sekolah. Pelaksanaan dimulai sejak bulan Agustus sampai akhir September 2019. Pelaksanaan Penugasan Dosen PDS diawali dengan observasi kelas yang dilakukan pada tanggal 13 Agustus 2019, kemudian dilanjutkan penyusunan RPP bersama guru pada tanggal 13 dan 14 Agustus 2019, selanjutnya melakukan praktik mengajar kelas X IPA 5 pada tanggal 20 dan 27 Agustus 2019, serta tanggal 3 dan 10 September 2019. Materi pada tanggal 20 Agustus 2019 terdiri dari dasar hukum wilayah Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia–Nusantara, macam-macam wilayah Indonesia, urgensi batas wilayah Negara Indonesia, tiga zona lautan Indonesia, dan batas wilayah daratan Indonesia. Selanjutnya materi ajar pada tanggal 27 Agustus 2019 terdiri dari kedudukan warga Negara dan penduduk Indonesia, asas-asas kewarganegaraan, status kewarganegaraan, proses pewarganegaraan, dan kehilangan kewarganegaraan. Materi yang diajarkan pada tanggal 3 September 2019 terdiri dari landasan yuridis kemerdekaan dalam beragama dan berkepercayaan, makna kemerdekaan dalam beragama dan berkepercayaan, perwujudan kemerdekaan beragama, bentuk kerukunan umat beragama. Materi yang diajarkan pada tanggal 10 September 2019 terdiri dari landasan hukum sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia, substansi sistem pertahanan dan keamanan negara kesatuan Republik Indonesia, perbedaan tugas dan peran TNI dengan Kepolisian Republik Indonesia, pelaksanaan

sistem pertahanan dan keamanan RI (Sishankamrata), ciri-ciri pertahanan keamanan rakyat semesta, kesadaran bela negara (landasan hukum, pengertian), dan wujud bela negara.

Integrasi teknologi informasi dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMA N 1 Bantul ini menggunakan sistem pendekatan topik (*Thema-Centered Approach*). Romiszowski (Oemar Hamalik, 2003: 201) merumuskan media pengajaran “...as the carrier of messages, from some transmitting source (which may be a human being or an intimate object), to the receiver of the messages (which is our case is the learner) fungsinya sebagai pesan yang dikirimkan dari berbagai sumber guna pemahaman yang si penerima pesan atau dalam hal ini siswa.

Merumuskan media pembelajaran berbasis teknologi diaplikasikan dalam topik atau materi pembelajaran ditentukan, yang dilanjutkan menentukan tujuan pembelajaran, dan menentukan aktivitas proses pembelajaran yang akan dilakukan serta *software* yang diaplikasikan. Pada pertemuan tanggal 20 Agustus 2019 dengan sesuai kompetensi dasar yakni menganalisis ketentuan UUD NRI 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan sesuai Permendikbud nomor 37 tentang KI dan KD PPKn di Sekolah Menengah Atas khususnya kelas X.

Adapun bahasan materinya tentang dasar hukum wilayah Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia – Nusantara, macam-macam wilayah Indonesia, urgensi batas wilayah Negara Indonesia, tiga zona lautan Indonesia, dan batas wilayah daratan Indonesia. Guna mencapai tujuan pembelajaran memahami wilayah Indonesia secara utuh, memahami pentingnya batas suatu negara dan mampu menelaah zona lautan di Indonesia guru merumuskan strategi pembelajaran dengan menggunakan sumber belajar berbasis teknologi informasi (TI). Pada pembelajaran materi tersebut menggunakan video yang menjelaskan batas-batas Indonesia darat, laut maupun udara sebagai penguatan pengetahuan kewarganegaraan. Kemudian untuk mengembangkan keterampilan sesuai kompetensi dasar peserta didik menelaah wilayah negara kesatuan Republik Indonesia melalui penugasan presentasi sesuai tema yang sudah dibagikan guru. Perkelompok presentasi

menganalisis batas wilayah, pentingnya batas wilayah, zona lautan Indonesia tentunya berbekal video yang sudah dijelaskan guru dan literasi digital melalui *google* untuk mengakses *e-book*.

Proses pembelajaran tersebut memfungsikan seluruh indera yang dimiliki peserta didik, Misalnya ada salah satu indera yang tidak berfungsi dengan baik. Namun dengan adanya *project* dalam belajaran materi perbatasan Indonesia menggunakan video sebagai media pembelajaran menjadikan kekuatan indera yang lainnya berfungsi dengan baik. Selain itu juga mengembangkan sikap peduli akan keutuhan bangsa serta urgensi persatuan guna menangkal ancaman berupa eksploitasi illegal berupa sumber daya alam yang kerap kali dilakukan oleh negara asing seperti *illegal fishing* atau keingan suatu daerah untuk melepaskan diri dari NKRI.

Pembelajaran yang dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2019 dengan materi kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia, asas-asas kewarganegaraan, status kewarganegaraan, proses pewarganegaraan, dan kehilangan kewarganegaraan, guru menggunakan teknologi informasi berupa *e-book* yang diunduh tentang kewarganegaraan dan pewarganegaraan secara mandiri. Sumber belajar tersebut digunakan untuk persiapan menjawab undian pertanyaan dan menemukan beberapa kasus kewarganegaraan. Metode pembelajaran dengan *learning starts with a question* (pembelajaran yang dimulai dengan pertanyaan), pertanyaan diberikan dengan cara undian, dan peserta didik menjawab dengan cara berebut. Teknologi informasi dalam pembelajaran ini berperan sebagai sumber belajar. Peserta didik dalam mempersiapkan jawaban, diarahkan untuk *searching* dan mempelajari materi ajar baik yang ada dalam buku digital (*e-book*). Proses pembelajaran tersebut memberi makna media berbasis teknologi informasi (TI) sebagai gambaran materi secara lengkap, sehingga peserta didik dapat menjadikan bekal sebagai pembentuk pengetahuan kewarganegaraan secara komperhensif tentang pewarganegaraan, urgensi warga negara dan asas kewarganegaraan. Serta menumbuhkan sikap positif berupa kemandirian peserta didik dalam setiap proses pembelajaran PPKn.

Pembelajaran yang dilakukan pada tanggal 3 September 2019 dengan materi ajar tentang landasan yuridis kemerdekaan dalam beragama dan berkepercayaan, makna kemerdekaan dalam

beragama dan berkepercayaan, perwujudan kemerdekaan dalam beragama, bentuk kerukunan umat beragama. Metode pembelajaran penugasan secara berkelompok dan presentasi tugas. Teknologi informasi berperan sebagai sumber belajar sekaligus sebagai media pembelajaran. Peserta didik ditugaskan menemukan contoh video atau film pendek tentang kerukunan umat beragama, kerukunan antar umat beragama, kemudian didiskusikan untuk dibuat deskripsinya, dan kemudian dipresentasikan untuk mendapatkan tanggapan dari kelompok lain. Dengan didukung pembelajaran berbasis teknologi membuat transmisi dari pembelajaran yang bersifat abstrak menjadi konkrit. Artinya meskipun proses pembelajaran dilakukan di dalam ruang kelas, namun melalui penayangan video contoh kerukunan umat beragama baik di Indonesia seacra khusus atau pun dunia secara umum dapat dilihat langsung oleh peserta didik. Berdasarkan sifatnya yang konkrit memudahkan peserta didik memahami konsep materi keberagaman. Hal ini dijadikan sebagai dasar pendidikan multikultural dan membentengi arus globalisasi yang mampu menghilangkan jati diri lokal dan nasional (HAR Tilaar: 2002). Sejatinya bangsa Indonesi terdiri dari berbagai suku,agama budaya yang terbingkai dalam Bhineka Tunggal Ika, sehingga kerukunan beragamapun harus senantiasa dipupuk melalui pendidikan khususnya dengan pemebelajaran yang konkrit.

Pembelajaran yang dilakukan pada tanggal 10 September 2019 dengan materi ajar tentang landasan hukum sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia, makna sistem pertahanan dan keamanan negara RI, perbedaan tugas dan peran TNI dengan Kepolisian RI, sistem pelaksanaan pertahanan dan keamanan RI, bela negara, teknologi informasi diintegrasikan dalam fungsinya sebagai sumber belajar dan media pembelajaran. Sebagai sumber belajar peserta didik untuk membuat video pendek tentang perwujudan bela negara peserta didik. Teknologi informasi diperankan sebagai media pembelajaran, dalam bentuk nyata berupa LCD, sebagai media presentasi video yang dibuat peserta didik. Metode pembelajaran penugasan, diskusi, dan presentasi. Dalam proses pembelajaran tersebut melihat materi yang cukup berat namun pembelajaran dengan pengintegrasian berbasis teknologi, membuat proses pembelajaran tidak monoton. Hal ini berdampak pada meningkatnya motivasi peserta

didik dalam mencari tahu makna atau konsep materi tersebut.

Marshall McLuhan (Oemar Hamalik, 2003: 201) mengungkapkan bahwa media merupakan ekstensi manusia yang dapat mempengaruhi orang lain meskipun tidak melakukan kontak secara langsung. Layaknya media komunikasi berupa televisi, media massa *online* maupun cetak, film, gadget atau *smart phone*. Penggunaan media sangat mendukung komunikasi dua arah sebagai indikator peserta didik partisipatif dalam proses kegiatan pembelajaran di kelas. Oleh karena itu *transfer of knowledge* materi atau konsep Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berbasis teknologi informasi (TI) berlangsung secara maksimal. Adanya pemahaman konsep atau materi kewarganegaraan dengan baik, maka memudahkan peserta didik untuk membiasakan dan membentuk karakter kewarganegaraan untuk langkah selanjutnya.

Gambaran Ketercapaian Tujuan PPKn dalam Pembelajaran PPKn yang Mengintegrasikan Teknologi Informasi pada Peserta Didik Kelas X SMA

Integrasi teknologi informasi (TI) dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk memberikan penguatan secara maksimal ketercapaian tujuan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Tentunya teknologi informasi (TI) berperan dalam penguatan pengetahuan kewarganegaraan dalam hal ini mentransfer konsep atau materi mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kemudian berbekal dengan konsep dan materi yang kuat, sehingga kecakapan berupa keterampilan kewarganegaraan akan semakin baik. Hal ini sebagai muara pembentukan karakter kewarganegaraan yang memahami hak dan kewajiban serta dilaksanakan dengan penuh bertanggungjawab berdasarkan ideologi Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945.

Berikut deskripsi ketercapaian penguatan tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam pembelajaran PPKn Kelas X IPA 5 SMA N 1 Bantul dengan mengintegrasikan teknologi informasi (TI) pada pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berupa video atau film dari *youtube*, dan *e-book* sebagai literasi digital. Secara umum dalam hal pengetahuan kewarganegaraan (pengetahuan tentang materi atau konsep hak dan kewajiban sebagai warga

masyarakat, Hak Asasi Manusia (HAM), prinsip dan proses demokrasi, lembaga pemerintahan dan lembaga non pemerintah, identitas nasional, *rule of law*, peradilan yang bebas, konstitusi Indonesia, nilai dan norma dalam sebuah masyarakat guru maupun peserta didik sangat terbantu dengan adanya sumber belajar berupa internet dan media pembelajaran dalam semua materi, baik guru maupun peserta didik terbantu dengan adanya kecanggihan teknologi untuk melengkapi materi ajar. Materi ajar yang holistik berbasis teknologi informasi memudahkan dalam proses pemahaman materi tersebut sebagai langkah penguatan calon warga negara yang paham akan hak asasi manusia, proses demokrasi, identitas nasional sebagai karakter bangsa dan *rule of law* yang meminimalisir tindakan sewenang-wenang warga negara terhadap orang lain. Mengingat Indonesia adalah negara demokrasi yang tertuang dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945.

Sesuai tujuan dalam kompetensi inti melalui penanyangan video hak dan kewajiban peserta didik mampu memahami arti hak dan kewajiban serta contohnya secara baik. Melalui literasi digital peserta didik mampu menganalisis HAM, identitas nasional, dan *rule of law* di Indonesia secara menyeluruh. Pengetahuan kewarganegaraan peserta didik juga terbangun melalui penugasan dalam pembuatan video tentang tema bela negara dan naskah atau essay tentang bela negara. Peserta didik mampu membuat video dan naskah atau essay tentang bela negara dengan sistematis mulai dari pendahuluan, isi dan penutup.

Pembelajaran berbasis teknologi informasi (TI) memberi ruang pada peserta didik dalam mengakses informasi secara luas. Hal ini dimulai dari kesepakatan kelas memilih teknologi informasi apa saja yang akan digunakan sebagai sumber belajar. Pembelajaran yang demokratis dibangun guna tujuan kepekaan terhadap isu kewarganegaraan, mampu memecahkan masalah secara demokratis, mengambil keputusan secara kolektif dan mensosialisasikan hasil telaah melalui koridor demokrasi dilingkungan (Winantaputra, 20120). Hal tersebut merupakan penekanan proses pembelajaran di SMA 1 Bantul menjadikan guru sebagai fasilitator. Fasilitator berperan untuk memfasilitasi peserta didik guna tujuan pembelajaran secara maksimal. Hal ini didukung pula model, strategi, metode dan media pembelajaran yang inovatif. Tujuan pendidikan

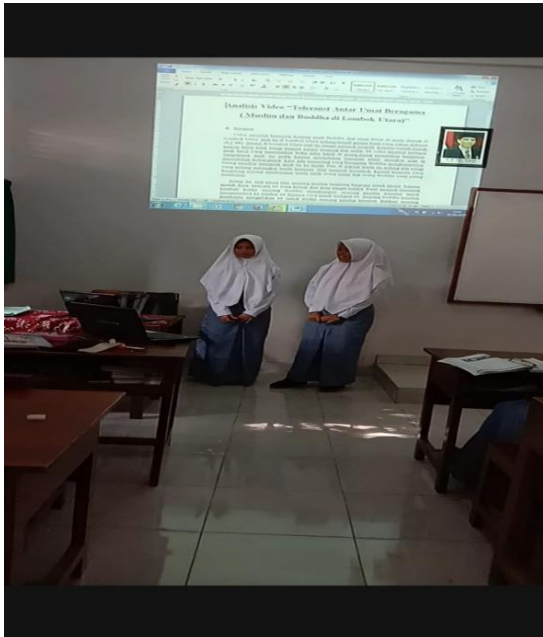
kewarganegaraan yang telah dilakukan dengan pengintegrasian teknologi informasi sebagai proses penyiapan warga negara yang baik dan cerdas melalui pengajaran. Seperti yang telah diungkapkan David Kerr (1992:2) Pendidikan Kewarganegaraan sebagai penyiapan warga negara muda yang bertanggungjawab, sehingga nantinya mampu mengambil peran sebagai waraga negara. Perumusan tersebut dilakukan PKn di persekolahan, berupa pengajaran dan belajar bagaimana membangun kompetensi waraga negara yang cerdas dan baik.

Strategi harus dirancang oleh pendidik secara matang sebagai haluan garis besar dalam mencapai sasaran berupa capaian pembelajaran dan didukung dengan media pembelajaran berbasis teknologi informasi. Karena proses pembelajaran adalah "mempelajari siswa menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan" (Sagala (2010: 61). Pada proses pembelajaran yang terkondisikan guru memiliki banyak pilihan dalam penggunaan sumber belajar berupa media disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Guru dapat juga memberikan contoh-contoh video yang sesuai dengan materi ajar dengan lebih efektif. Dengan adanya sumber belajar yang variatif tersebut, maka pengetahuan kewarganegaraan peserta didik lebih terbangun. Hal ini nampak ketika peserta didik mengerjakan tugas, proaktif mendiskusikan dan menanyakan kepada guru, bahkan memberikan usulan tambahan kolom isian dalam form lembar kerja peserta didik (LKPD) tentunya didukung menggunakan literasi digital yang dapat dibuka melalui *google*. Dalam hal ini pengetahuan kewarganegaraan terbangun saat peserta didik mengerjakan LKPD, peserta didik mampu mengerjakan LKPD dengan runtut dan logis. Pada prakteknya pembelajaran berbasis teknologi memotivasi peserta didik agar cakap dalam keterampilan kewarganegaraan. Berpartisipasi aktif dan bekerjasama dalam kelompok belajar dengan latarbelakang yang beranekaragam penuh rasa tanggungjawab.

Pengetahuan kewarganegaraan peserta didik lebih kelihatan terbangun, pada saat presentasi tugas dan menjawab pertanyaan. Pada saat presentasi tugas, peserta didik memberikan argumentasi dengan penuh semangat. Demikian juga pada saat guru menggunakan metode *learning by start question*, peserta didik berusaha menjawab pertanyaan dengan penuh antusias. Berbekal dari mempelajari materi ajar

yang bersumber dari media internet. Hal ini melatih dan berlomba-lomba dalam memberikan pemahaman dengan sudut pandang yang berbeda mampu memperkaya ilmu pengetahuan materi atau konsep yang sedang didiskusikan. Hal ini membangun kerjasama guna mencari solusi dalam suatu masalah dalam topik belajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.





Keterangan: Gambar bukti pengetahuan kewarganegaraan: kemampuan menjelaskan konsep.

Terkait keterampilan kewarganegaraan (yaitu keterampilan mempraktekkan atau menggunakan pengetahuan kewarganegaraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara), dalam pembelajaran PPKn di kelas X IPA 5 SMA N 1 Bantul ini, terlihat dalam keterampilan intelektual maupun keterampilan partisipatif pada kelompok dan kelasnya. Hal ini menumbuhkan keterampilan peserta didik sesuai kompetensi inti untuk menyajikan hasil

telaahnya mengenai materi ketentuan UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan. Selain itu juga mendemostrasikan hasil analisis berdasarkan kelompok masing-masing sesuai kompetensi dasar tersebut. Serta menumbuhkan sikap peduli kepada bangsanya melalui proses pembelajaran yang didukung teknologi informasi berupa tayangan video. Keterampilan kewarganegaraan meliputi mampu mengidentifikasi dan menjelaskan fenomena (isu politik); menganalisis dan menjelaskan terkait kehidupan politik atau bernegara, mengevaluasi dan mempertahankan pendapat pada isu dan berfikir kritis; berfikir secara konstruktif terkait solusi memperbaiki kehidupan politik atau negara (Patrick dan Vontz, 2001: 41).

Keterampilan intelektual peserta didik kelas X IPA 5 SMA N 1 Bantul ini terlihat pada saat mengerjakan lembar kerja peserta didik, tugas, dan pembuatan video. Keterampilan intelektual pada proses pembelajaran sebagai contoh pengetahuan peserta didik tentang batas-batas wilayah darat dan laut dituangkan dalam bentuk *project* menggambar batas wilayah dan laut negara Indonesia. Pengetahuan akan hak dan kewajiban warga negara digunakan sebagai dasar keterampilan pengetahuan dalam menanggapi berbagai kasus-kasus konflik antar umat beragama, kasus konflik antar suku, ras maupun budaya. Mengingat Indonesia merupakan negara yang pluralisme, memiliki keberagaman dalam suku, agama, ras dan antar golongan. Harapannya menjadi praktek pada kehidupan sehari-hari agar dapat hidup beriringan di tengah keberbedaan, sesuai dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika. Pengetahuan tentang syarat-syarat warga negara dijadikan sebagai dasar untuk menanggapi kasus kewarganegaraan baik *apatride* maupun *bipatriide*. Cukup banyak kasus di Indonesia tentang kewarganegaraan ganda selain itu juga menjadi keterampilan pengetahuan tentang bagaimana cara mendapatkan status kewarganegaraan di Indonesia.

Berdasarkan materi yang telah dipelajari ada tujuan guna memupuk rasa cinta tanah air dan sikap patriotisme dikembangkan kepada peserta didik setelah belajar tentang perbatasan wilayah, hak dan kewajiban warga negara Indonesia dan status kewarganegaraan. Hal ini sesuai makna pendidikan kewarganegaraan secara instrumental yang dijabarkan dalam

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 37 dinyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan yang dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Kemudian keterampilan secara partisipatif, terlihat adanya upaya setiap peserta didik ikut serta aktif pada proses mengerjakan dan mempresentasikan hasil tugas belajar kelompok. Setiap peserta didik memiliki kontribusi dalam proses penyelesaian tugas kelompok, sesuai dengan kesepakatan dalam pembagian tugas. Dalam hal ini peran teknologi informasi membantu peserta didik dalam pengaktualisasian berbagai pengetahuan kewarganegaraan menjadi lebih jelas dan konkrit. Seperti contoh kasus yang berkenaan dengan isu kajian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, sehingga membantu peserta didik mengkaji materi secara mendalam. Penggunaan teknologi informasi yang dikemas pada metode pembelajaran yang dirancang dan diaplikasikan, mampu melatih peserta didik agar belajar demokrasi secara utuh, yaitu belajar konsep, prinsip, instrumen, dan praksis demokrasi (*learning about democracy*). Belajar dengan iklim dan melalui proses lingkungan sosial, komunikasi, dan kolaborasi secara demokratis (*learning through democracy*), dan belajar membangun kehidupan demokratis (*learning for democracy*). Jadi proses pembelajaran yang menekankan presentasi hasil belajar kelompok sebagai miniatur proses kegiatan berdemokrasi di Indonesia. Peserta didik mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan seputar tema diskusi dengan penuh rasa tanggungjawab. Dilandasi dengan cara pemikiran yang kritis rasional dan sistematis dalam mendapatkan informasi serta menanggapi berbagai isu diskusi.

Hal ini menjadikan tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tercapai dengan baik. Seperti yang diungkapkan oleh Patrick dan Vontz (2001:41) tujuan dasar dari belajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang berpusat pada pendidik dan peserta didik untuk membelajarkan dan belajar secara sistematis dan menyeluruh menjadi konsepsi demokrasi meliputi didefinisikan, dipraktikkan, dan dievaluasi. Proses merupakan hal yang tidak dapat dikesampingkan. Proses evaluasi dilakukan guna memperbaiki kualitas pembelajaran yang

sudah dilakukan sebagai refleksi untuk menyiapkan pembelajaran yang akan datang.





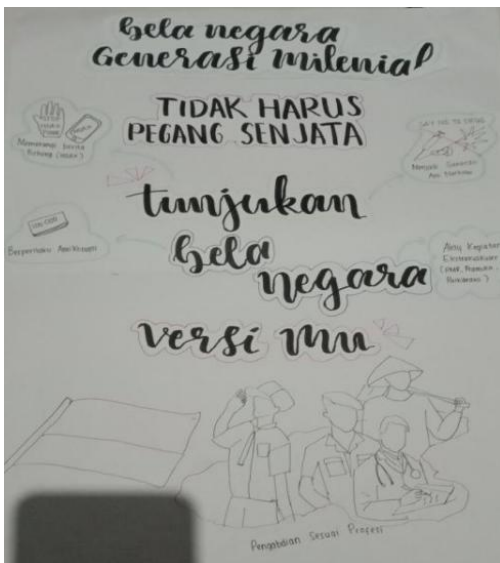
Keterangan: Gambar bukti keterampilan kewarganegaraan: implementasi konsep dalam penyelesaian masalah.

Dalam hal karakter atau watak kewarganegaraan (sikap atau perilaku baik yang dilakukan oleh peserta didik) dapat terlihat pada saat pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di kelas X IPA 5 SMA N 1 Bantul berlangsung menggunakan metode diskusi, penugasan, *learning by start question*, dan *learning by project*, yang didukung dengan teknologi informasi yang berupa LCD, pemutaran video, pembuatan video, dan pemberian kesempatan akses materi ajar melalui *smart phone* yang dimiliki peserta didik. Karakter kewarganegaraan, berupa perilaku - perilaku dan sikap - sikap yang merupakan realisasi pengetahuan dan keterampilan kewarganegaraan masing - masing peserta didik.

Realisasi tersebut antara lain terlihat dalam tumbuhnya sikap peduli, tanggung jawab, kerja keras, disiplin, kerja sama, dan jujur pada peserta didik. Karakter kewarganegaraan terlihat adanya kesigapan ketua kelas untuk melakukan koordinasi pembentukan kelompok, untuk mengerjakan tugas, diikuti dengan kesediaan semua peserta didik pada proses pembelajaran. Ketika mengerjakan tugas kelompok, terlihat sikap kerja sama, kerja keras, peduli, dan tanggung jawab muncul pada setiap peserta didik dengan adanya tugas yang telah diberikan. Hal ini memaknai Pendidikan Kewarganegaraan dirasa mampu membentuk warga negara yang memiliki kecakapan dan kepedulian terhadap lingkungan secara efektif (Mukhamad Murdiono, 2012: 47).

Peserta didik memiliki tanggungjawab dengan kelompoknya. Perilaku tanggung jawab juga terlihat ketika proses presentasi hasil tugas berlangsung di depan kelas. Peserta didik mewakili kelompoknya berusaha menjelaskan secara runtut dan holistik. Sikap jujur terlihat pada saat terdapat kesamaan dalam menemukan video tentang kerukunan antar umat beragama. Kelompok tersebut dengan keras menyampaikan bahwa video yang mereka temukan sama dengan video yang sedang ditayangkan. Keterbukaan dalam penyampaian informasi di dalam kelas menjadi indikator terciptanya karakter kewarganegaraan para peserta didik. Secara lebih nyata, karakter kewarganegaraan yang mereka tuangkan dalam video, naskah atau esay, dan poster adalah watak bela negara yang berupa sikap menolak narkoba, berperilaku anti koruptif seperti tidak mencontek, tidak menerima suap, memerangi berita bohong (*hoax*), ujaran kebencian berbasis SARA, peduli lingkungan, dan aktif dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Sikap-sikap seperti ini yang perlu dikembangkan dan menjadi pola hidup guna membentuk warga negara muda yang cerdas dan baik. Kegiatan ekstrakurikuler juga mampu menumbuhkan kembangkan karakter kewarganegaraan. Kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat kegiatan penambah, pengayaan dan perluasan dari proses pembelajaran intrakurikuler yang bersifat menyenangkan dan mengembangkan serta mengatualisasikan nilai-nilai karakter (PPK, 2016: 14). Adapun kegiatan ekstrakurikuler yang peserta didik di SMA N 1 Bantul ikuti antara lain: Palang Merah Remaja, Pramuka, dan Paskibraka.





Keterangan: gambar bukti karakter kewarganegaraan

SIMPULAN

Berdasarkan deskripsi dalam hasil penelitian dan pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran yang bersifat multidisipliner. Dengan adanya tujuan pembentukan karakter kewarganegaraan yang baik dan cerdas, membutuhkan kolaborasi dengan teknologi informasi (TI) di zaman yang serba modern. Kolaborasi proses pembelajaran dengan teknologi informasi (TI) dilakukan guna mengembangkan sumber bahan ajar maupun sebagai media pembelajaran yang sifatnya interaktif. Selain itu untuk memperkuat kajian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang sifatnya dinamis. Pengintegrasian pembelajaran berbasis teknologi informasi (TI)

dalam pembelajaran PPKn dikolaborasikan dengan model pembelajaran yang inovatif. Selain itu karakteristik peserta didik juga diperhatikan agar langkah-langkah pembelajarannya sesuai dengan capaian kompetensi dasar dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan secara khusus. Kemudian secara umum mampu mengembangkan *civic knowledge*, *civic skill*, dan *civic disposition*, yang terkristal menjadi *civic virtue* (keadaban kewarganegaraan) dapat berjalan maksimal.

Pengintegrasian teknologi informasi (TI) seperti video atau film pendek, dan *e-book* sebagai literasi digital pada pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di kelas XIPA 5 SMA 1 Bantul mampu menguatkan pengetahuan kewarganegaraan peserta didik, menambah wawasan pengetahuan kewarganegaraan dalam memecahkan permasalahan kewarganegaraan secara kritis. Watak kewarganegaraan dapat dikembangkan seperti sikap dan perilaku tanggungjawab, kerja sama, kerja keras, disiplin, peduli, perilaku anti narkoba, anti koruptif, peduli lingkungan yang muncul pada proses pembelajaran mengacu ada kompetensi inti mata pelajaran PPKn. Selain itu keterlibatan secara aktif pada kegiatan ekstrakurikuler semakin memperkuat karakter kewarganegaraan sebagai upaya penyiapan warga negara yang baik dan cerdas, sebagai aset kemajuan bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aka, Kukuh Andri (2017). Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) Sebagai Wujud Inovasi Sumber Belajar di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Sekolah Dasar Volume 1 Nomor 2a Desember 2017 P-ISSN : 2581-1800 E-ISSN : 2597-4122* 28.
- Anshori, Sidiq. (2018). Pemanfaatan Teknologi Infomasi dan Komunikasi sebagai Media Pembelajaran. *Jurnal Ilmu Pendidikan PKn dan Sosial Budaya, 2018 - jurnal.stkippgri-bkl.ac.id hal 88-100*.
- Bakti Soeparno. (1988). *Media Pengajaran Bahasa*. Jakarta : PT Inter-Pariwisata.
- Budiman, Haris. (2017). Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pendidikan. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*,

- Volume 8 No. 1 2017 P.ISSN : 20869118 E-ISSN: 2528-2476. Lampung.
- Branson, M.S. (1998). *The role of civic education*. Casabaras : CCE.
- Center for Civic Education/ CCE. 1994. *Civitas: National Standards for Civics and Government*. Calabasas : CCE.
- Cogan, J.J. (1991). *Developing the civic society: the role of civic education*. Bandung : CISED.
- Fryer, Wesley A.2001. "Strategy for Effective Elementary Technology Integration". <http://www.wtvi.com/teks/integrate/tcea2001/powerpointoutline.pdf>.
- Idrus, Ali. 2009. *Manajemen Pendidikan Global*. Jakarta : GP Press.
- Kerr, David. (1999). *Citizenship education: an international comparison*. England: National Foundation for Educational Research-NFER.
- Muhson, Ali. (2010). Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia, Vol. VIII. No. 2 – Tahun 2010, Hlm. 1 - 10*. Yogyakarta.
- Murdiono, Mukhamad. (2012). *Strategi Pembelajaran Kewarganegaraan : Berbasis Portofolio*. Yogyakarta: Ombak.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Norton, Priscilla dan Sparque, Debra. (2001) . *Technology for Teaching*". Allyn and Bacon. Boston : USA.
- Patrick, John J. and Thomas S. Vontz. (2001) . *Components of education for democratic citizenship in the preparation of social studies teacher*. Dalam John J. Patrick dan Robert S. Leming (eds.). (2001).
- Sagala, S. (2010). *Konsep dan Makna Pembelajaran*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno. (2017). Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Mata Pelajaran PPKn Berbasis *Project Citizen* di Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Civics Volume 14 Nomor 2, Oktober 2017*.
- Tilaar, H.A.R. (2002). *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Tim PPK. (2016). *Pedoman Penguatan Pendiidkan Karakter*. Kementerian Pendidikan dan Dinas Kebudayaan Indonesia.
- Oemar Hamalik (2003) *Media Pendidikan, Cetakan VI*, Bandung : PT Citra Aditya
- UNESCO Institute for Information Technologies in Education. 2002. "Toward Policies for Integrating ICTs into Education". Hig-Level Seminar for Decision Makersband Policy-Makers : Moscow.
- Uwes Anis Chaeruman. (2019) . *Mengintegrasikan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) ke dalam Proses Pembelajaran*. Makalah disampaikan pada Workshop Penyusunan RPP Penugasan Dosen ke Sekolah di FKIP UAD, Agustus 2019.
- Winatapura, Udn. S. (2015) ." *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPkn) untuk Generasi Emas Indonesia: Rekonstruksi Capaian Pembelajaran*", dalam Prosiding Seminar Nasional Penguatan Komitmen Akademik dalam Memperkokoh Jatidiri Pendidikan Kewarganegaraan, 4 April 2015. Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Departemen Pendidikan Kewarganegaraan FPIPS UPI : Bandung.
- _____, Dasim Budimansyah dan Sapriya. (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Persepektif Pendidikan untuk Mencerdasakan Kehidupan Bangsa (Gagasan, Instrumentasi, dan Praksis)*. Bandung: Widya Aksara Press.